

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki tantangan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang merata. Ketimpangan pembangunan antara daerah maju dan daerah tertinggal sering kali menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Disparitas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia mencerminkan ketimpangan ekonomi antarprovinsi yang signifikan. Data dari Badan Pusat Statistik (2022) menunjukkan perbedaan mencolok dalam PDRB per kapita di berbagai provinsi. Sebagai contoh, pada tahun 2022, Provinsi DKI Jakarta memiliki PDRB per kapita tertinggi, sementara Provinsi Nusa Tenggara Timur berada di posisi terendah.

Faktor seperti konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah tertentu, terutama di Pulau Jawa, berkontribusi pada ketimpangan ini. Provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur memiliki kontribusi signifikan terhadap PDB Nasional, sementara provinsi di kawasan timur Indonesia cenderung memiliki kontribusi yang lebih kecil. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2017) menunjukkan bahwa konsentrasi aktivitas ekonomi di Pulau Jawa menyebabkan ketimpangan yang besar dalam distribusi PDB antar wilayah, dengan Pulau Jawa berkontribusi sekitar 58% terhadap total PDB nasional, sementara kawasan timur Indonesia hanya menyumbang sekitar 15%. Dalam hal ini, perkembangan aktifitas ekonomi daerah sering kali diukur dengan menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang mencerminkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam periode tertentu. PDRB mencerminkan

sejauh mana sektor-sektor ekonomi di suatu daerah berkembang, serta dapat menunjukkan kualitas hidup masyarakat yang meningkat.

Beberapa upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi ketimpangan ini adalah melalui pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan diversifikasi ekonomi di provinsi-provinsi dengan PDRB per kapita rendah. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Infrastruktur yang memadai dan terdistribusi secara merata seperti ketersediaan infrastruktur jalan (bina marga), infrastruktur sumber daya air, fasilitas pendukung permukiman (cipta karya) serta perumahan memiliki potensi untuk meningkatkan konektivitas, efisiensi distribusi barang dan jasa yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan taraf ekonomi masyarakat di setiap daerah secara keseluruhan.

Salah satu institusi pemerintah yang memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki tanggung jawab untuk mengelola urusan pemerintahan dalam sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dengan tujuan mendukung Presiden dalam pelaksanaan pemerintahan negara. Kementerian ini memiliki tanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di empat bidang utama, yaitu Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Perumahan. Melalui empat bidang utama tersebut pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung tercapainya keseimbangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah di Indonesia.

Masing-masing bidang infrastruktur Kementerian PUPR memiliki peran spesifik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu:

1. Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Bidang Bina Marga terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pembangunan infrastruktur di bidang Bina Marga yang meliputi pembangunan jalan raya, jembatan, dan sistem transportasi lainnya, memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur transportasi yang lebih baik akan mempermudah pergerakan barang dan manusia, serta mengurangi biaya logistik yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi sektor ekonomi. Sebagai contoh, Romer (1990) mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi berperan dalam mengurangi biaya transaksi dan mempercepat aliran barang, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan memperbesar PDRB. Penelitian yang dilakukan oleh Perera *et al.* (2015) juga menunjukkan bahwa pembangunan jalan yang baik dapat mengurangi isolasi wilayah, meningkatkan konektivitas, dan membuka peluang pasar yang lebih besar bagi daerah-daerah yang sebelumnya terpinggirkan.

2. Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pembangunan infrastruktur di bidang Sumber Daya Air (SDA) berfokus pada penyediaan air bersih, pengelolaan irigasi, dan pengendalian bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Infrastruktur SDA yang memadai berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan dan sektor pertanian, yang merupakan sektor ekonomi utama di banyak daerah di Indonesia. Penelitian oleh Calderón & Servén (2010) menunjukkan bahwa pengelolaan SDA yang baik

dapat mengurangi kerugian akibat bencana alam, memperbaiki ketahanan pangan, dan meningkatkan produktivitas pertanian, yang berujung pada peningkatan PDRB daerah. Selain itu, SDA yang memadai juga mendukung sektor industri yang bergantung pada ketersediaan air, seperti industri pengolahan makanan dan minuman, yang ikut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

3. Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Infrastruktur Cipta Karya mencakup pembangunan fasilitas umum seperti pasar, gedung pemerintahan, dan sistem sanitasi. Pembangunan ini berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat serta aktivitas ekonomi daerah. Barro (1991) menjelaskan bahwa pembangunan fasilitas publik yang baik dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dengan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman untuk bekerja dan berbisnis. Pembangunan infrastruktur Cipta Karya yang efektif dapat mendorong pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan, yang pada gilirannya akan berkontribusi terhadap PDRB daerah. Peningkatan kualitas pasar dan tempat-tempat perdagangan juga akan meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja baru.

4. Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Bidang Perumahan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pembangunan infrastruktur perumahan yang memadai, termasuk pembangunan rumah yang layak huni, jalan, dan fasilitas umum lainnya, memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan sektor perumahan akan menciptakan lapangan kerja dalam

sektor konstruksi serta sektor terkait seperti industri bahan bangunan dan jasa keuangan. Wheeler (2014) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa sektor perumahan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa yang terkait dengan pembangunan dan penghuni rumah. Selain itu, kualitas perumahan yang baik meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang turut berkontribusi pada peningkatan PDRB daerah.

5. Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Perumahan Secara Simultan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Selain pengaruh masing-masing sektor infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penting untuk menilai dampak simultan dari pembangunan infrastruktur di semua bidang ini. Penelitian yang dilakukan oleh Calderón & Servén (2010) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur secara simultan dalam berbagai sektor memiliki dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daripada pembangunan sektor-sektor tersebut secara terpisah. Infrastrukturnya yang saling terintegrasi akan mempercepat distribusi barang, meningkatkan ketahanan pangan, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan produktif. Secara keseluruhan, pembangunan yang holistik dapat menciptakan pemerataan ekonomi antarwilayah dan mengurangi ketimpangan pembangunan, yang pada akhirnya meningkatkan PDRB daerah secara signifikan.

Seperti yang telah dijelaskan, elemen yang berkontribusi terhadap permasalahan ketimpangan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia adalah adanya disparitas infrastruktur yang cukup mencolok antara daerah yang

lebih maju dan yang tertinggal. Wilayah yang dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai cenderung menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan dibandingkan dengan wilayah yang memiliki keterbatasan dalam infrastruktur publik. Pembangunan infrastruktur yang merata memiliki potensi untuk membuka akses bagi daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi, memungkinkan mereka untuk terhubung dengan pasar yang lebih luas, memperkuat sektor ekonomi lokal, serta mempercepat proses integrasi antar wilayah di Indonesia.

Pembangunan infrastruktur berperan sebagai alat yang sangat krusial dalam mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata di seluruh penjuru Indonesia. Penelitian oleh Mangun (2016) menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan infrastruktur antar wilayah di Indonesia berdampak langsung terhadap perbedaan laju pertumbuhan ekonomi. Daerah yang memiliki akses infrastruktur yang baik, seperti di Pulau Jawa, memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sementara daerah yang terbatas infrastrukturnya, seperti di Papua dan Nusa Tenggara, mengalami pertumbuhan yang lebih lambat. Hal ini menjadi dasar yang kuat bagi penulis untuk melakukan analisis mendalam mengenai pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, serta untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi dampak dari pembangunan infrastruktur tersebut.

Berbagai penelitian terdahulu telah menunjukkan adanya hubungan positif antara pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Aschauer (1989) menunjukkan bahwa investasi dalam infrastruktur berpengaruh positif terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Begitu pula dengan penelitian oleh Calderón &

Servén (2010) yang menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang efisien berkontribusi signifikan terhadap peningkatan PDRB suatu negara. Lebih lanjut lagi, penelitian yang dilakukan oleh Damayanti *et al.* (2023) menyimpulkan bahwa pengelolaan dan optimalisasi aset infrastruktur, termasuk ruas jalan nasional, memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan penerimaan negara dan produktivitas masyarakat.

Penelitian lainnya, yaitu studi oleh Kumo (2012) yang dilakukan untuk mengevaluasi apakah investasi infrastruktur secara kausal memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Afrika Selatan, negara berkembang yang memiliki tantangan dalam mengatasi kesenjangan infrastruktur. Penelitian menggunakan metode analisis *Granger Causality* untuk melihat hubungan kausal antara dua variabel, yaitu investasi infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan mencakup periode 1960 hingga 2009. Penelitian ini menemukan hubungan kausal dua arah antara investasi infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, di mana investasi mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara pertumbuhan ekonomi juga menciptakan permintaan lebih besar untuk infrastruktur. Dampak positif lebih besar terlihat ketika investasi dilakukan secara efisien dan transparan. Studi ini memberikan pendekatan metodologis yang dapat diterapkan dalam penelitian di Indonesia, yaitu untuk menguji hubungan sebab-akibat antara pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Meskipun penelitian terdahulu telah banyak memberikan wawasan penting mengenai hubungan antara pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman mengenai sejauh mana pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian PUPR

memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah di Indonesia. Berikut adalah analisis *gap* penelitian terdahulu dibandingkan dengan fokus penelitian tesis ini:

1. Ketimpangan dampak pembangunan infrastruktur antara daerah maju dan daerah tertinggal

Mayoritas penelitian yang ada umumnya menganalisis dampak pembangunan infrastruktur dari sudut pandang makroekonomi atau tingkat nasional. Studi yang mengevaluasi dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi sering kali fokus pada kontribusi infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) secara keseluruhan, tanpa mempertimbangkan disparitas yang muncul di antara berbagai daerah. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang sangat beragam, memerlukan kajian yang lebih mendalam tentang dampak pembangunan infrastruktur terhadap ekonomi di tingkat lokal dan daerah. Penelitian Aschauer (1989) cenderung memberikan gambaran umum tanpa mengidentifikasi dampak spesifik di daerah-daerah yang belum berkembang, misalnya di Indonesia seperti daerah di luar Jawa dan Bali. *Gap* ini mencakup pemahaman mengenai bagaimana kebijakan PUPR terkait pembangunan infrastruktur dapat mengurangi kesenjangan antar daerah melalui penyediaan akses yang lebih merata.

2. Fokus pada infrastruktur oleh Kementerian PUPR

Sebagian besar penelitian, seperti oleh Kumo (2012), membahas investasi infrastruktur secara umum tanpa memisahkan peran institusi tertentu dalam pembangunan. Hal ini membuat sulit untuk mengevaluasi dampak langsung program yang dikelola oleh institusi tertentu, seperti Kementerian PUPR di

Indonesia. Belum ada penelitian yang secara spesifik mengukur dampak pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR, yang mencakup proyek bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Perumahan. Penelitian ini fokus pada pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, sehingga memberikan evaluasi yang lebih terarah dan spesifik tentang dampak institusi ini terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Pengaruh bidang infrastruktur yang berbeda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya hanya membahas pengaruh pembangunan infrastruktur secara akumulatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun belum terdapat penelitian yang menguraikan kontribusi infrastruktur dari masing-masing klasifikasi bidang yang lebih rinci seperti bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Maka dari itu, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai dampak sektor bidang-bidang tersebut terhadap perekonomian daerah. Studi yang melibatkan berbagai aspek bidang infrastruktur ini diharapkan mampu menyajikan pemahaman yang lebih spesifik mengenai bagaimana pembangunan infrastruktur bidang tertentu dapat memaksimalkan pertumbuhan ekonomi.

Melalui analisis kesenjangan yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada kajian mendalam mengenai dampak pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Penelitian ini penting karena pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian PUPR, telah

mengalokasikan anggaran yang substansial untuk pengembangan berbagai proyek infrastruktur, seperti infrastruktur bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Perumahan. Studi ini memiliki signifikansi yang besar dalam menyediakan bukti empiris yang dapat dijadikan landasan untuk merumuskan kebijakan pembangunan infrastruktur yang lebih efektif, dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi disparitas antar wilayah di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pembangunan infrastruktur bidang Bina Marga terhadap pertumbuhan ekonomi daerah?
2. Bagaimana pengaruh pembangunan infrastruktur bidang Sumber Daya Air terhadap pertumbuhan ekonomi daerah?
3. Bagaimana pengaruh pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah?
4. Bagaimana pengaruh pembangunan infrastruktur bidang Perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah?
5. Bagaimana pengaruh pembangunan infrastruktur bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Perumahan secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah tersebut adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh pembangunan infrastruktur bidang Bina Marga terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Menganalisis pengaruh pembangunan infrastruktur bidang Sumber Daya Air terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Menganalisis pengaruh pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Menganalisis pengaruh pembangunan infrastruktur bidang Perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Menganalisis pengaruh pembangunan infrastruktur bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Perumahan secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Studi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan yang berarti, baik dari segi teori maupun praktik, dalam pemahaman dan pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi terhadap Pengembangan Ilmu Ekonomi Pembangunan

Studi ini menyumbangkan pemikiran dalam pengembangan teori ekonomi pembangunan, khususnya yang menyoroti pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Literatur yang ada umumnya mengakui signifikansi infrastruktur sebagai elemen pendukung

pertumbuhan ekonomi. Namun, hubungan yang lebih mendalam antara pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR dan pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia masih belum banyak dieksplorasi. Melalui penerapan data empiris dan analisis statistik, studi ini diharapkan mampu memperkaya wawasan tentang pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap perekonomian lokal di Indonesia, baik di wilayah yang telah berkembang maupun di daerah yang masih dalam tahap pertumbuhan.

2. Pengayaan Literatur tentang Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Daerah

Melalui analisis yang komprehensif terhadap pengaruh pembangunan infrastruktur di berbagai sektor (seperti Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Perumahan), penelitian ini bertujuan untuk memperkaya referensi dalam literatur akademik mengenai keterkaitan antara infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sektor-sektor prioritas yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari kebijakan publik. Temuan dari penelitian ini dapat berfungsi sebagai acuan dalam pengembangan kebijakan dan sebagai dasar teoretis untuk penelitian selanjutnya dalam bidang ekonomi pembangunan, dengan fokus pada optimalisasi peran sektor infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi lokal.

3. Penyusunan Kerangka Teoritis yang Lebih Komprehensif

Studi ini berpotensi untuk menyusun kerangka teoritis yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kebijakan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi regional.

4. Implikasi Kebijakan terhadap Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Tertinggal

Secara teoritis, penelitian ini juga memberikan kontribusi penting terhadap kebijakan pembangunan di daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggal. Dengan memahami hubungan antara infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah, penelitian ini dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk daerah-daerah yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan ekonomi. Dalam konteks daerah tertinggal, kebijakan pembangunan infrastruktur dapat diarahkan untuk memfokuskan upaya pada sektor-sektor yang memiliki potensi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, seperti sektor pertanian, pariwisata, atau perdagangan. Studi ini dapat memperkaya teori-teori yang ada mengenai strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, serta memberikan panduan untuk kebijakan yang dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antara daerah maju dan tertinggal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyumbangkan wawasan teoritis tentang pengaruh infrastruktur terhadap ekonomi daerah secara umum, tetapi juga memberikan dimensi baru dalam merancang kebijakan yang mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Rekomendasi Prioritas Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Daerah Tertinggal untuk Pemerintah

Manfaat utama dari penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk menyajikan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada data empiris kepada pemerintah, terutama kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggal sering kali menghadapi tantangan besar terkait keterbatasan infrastruktur. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan infrastruktur harus difokuskan pada daerah-daerah yang paling membutuhkan. Prioritas harus diberikan kepada sektor-sektor infrastruktur yang dapat memberikan dampak langsung pada perekonomian daerah, seperti infrastruktur transportasi untuk meningkatkan konektivitas, aksesibilitas pasar, dan distribusi barang, serta infrastruktur energi yang dapat mendukung kegiatan industri dan pertanian. Peningkatan infrastruktur di daerah tertinggal dapat mempercepat proses inklusi ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

2. Penguatan Program Pembangunan Berbasis Potensi Lokal

Daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggal umumnya memiliki potensi lokal yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan harus diarahkan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi lokal yang ada, seperti sektor pertanian, perikanan, atau pariwisata. Pemerintah dapat merancang kebijakan yang mendukung penguatan sektor-sektor unggulan ini dengan pembangunan infrastruktur yang relevan. Misalnya, wilayah yang memiliki potensi pertanian bisa diprioritaskan untuk pembangunan sistem irigasi dan akses jalan yang memadai, sementara daerah yang memiliki potensi wisata perlu diperkuat dengan infrastruktur transportasi dan fasilitas pendukung wisata lainnya.

3. Meningkatkan Akses ke Pembiayaan untuk Daerah Tertinggal

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggal adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung akses pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur di daerah tersebut sangat diperlukan. Ini dapat mencakup pemberian insentif fiskal bagi investor yang bersedia menanamkan modalnya di daerah tertinggal, serta pemberian dukungan keuangan langsung kepada pemerintah daerah untuk proyek-proyek infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

4. Kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk daerah-daerah yang tertinggal dalam kerangka pemerataan pembangunan. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu berperan aktif dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah tersebut. Pendekatan kolaboratif ini akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran dan dapat memaksimalkan potensi daerah untuk berkembang.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Berikut adalah beberapa aspek cakupan dalam penelitian:

1. Aspek Wilayah

Penelitian ini akan difokuskan pada seluruh 38 provinsi di Indonesia yang menerima alokasi anggaran pembangunan infrastruktur dari Kementerian PUPR. Beberapa provinsi yang dipilih akan menjadi sampel penelitian untuk mewakili berbagai kondisi ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

2. Bidang Infrastruktur

Penelitian ini akan menilai berbagai bidang infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR, yaitu bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Perumahan.

3. Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Untuk menilai pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penelitian ini akan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

4. Periode Waktu Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan data dari tahun 2022 hingga 2024. Adapun penetapan periode waktu penelitian tersebut didasarkan pada penerapan kebijakan *refocussing* anggaran pembangunan akibat pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020-2021, sehingga berdampak signifikan pada prioritas pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR.

5. Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi untuk mengukur hubungan antara pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah. Data yang digunakan akan bersumber dari

laporan tahunan Kementerian PUPR, Badan Pusat Statistik (BPS), serta data ekonomi daerah yang relevan.

6. Batasan Penelitian

Penelitian ini tidak akan mencakup analisis terhadap pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh sumber selain Kementerian PUPR, seperti anggaran daerah atau investasi swasta. Selain itu, penelitian ini hanya akan menganalisis pengaruh dari pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan tidak akan mencakup dampak sosial dan lingkungan secara mendalam. Penelitian ini tidak melibatkan faktor eksternal yang meliputi kebijakan fiskal pemerintah, fluktuasi ekonomi global, dan perubahan sosial-politik yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Keberadaan faktor-faktor eksternal tersebut tidak dilibatkan meskipun dapat mempengaruhi hubungan antara pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi daerah merujuk pada peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah dalam periode waktu tertentu, yang biasanya diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Teori Pertumbuhan Ekonomi Daerah menurut Perkins, Radelet, Lindauer, & Block (2013) dalam bukunya "*Economics of Development*" menyarankan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor eksternal seperti kebijakan makroekonomi atau aliran investasi global, tetapi juga oleh faktor-faktor internal yang lebih spesifik yang berkaitan dengan karakteristik dan kondisi lokal dari daerah tersebut. Dalam perspektif mereka, pertumbuhan ekonomi daerah berhubungan erat dengan dinamika internal dan eksternal yang berinteraksi dalam konteks geografis, sosial, dan ekonomi yang spesifik.

Terdapat beberapa konteks yang dapat mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang dijelaskan di bawah ini:

1. Konteks Geografis dan Ketersediaan Sumber Daya Alam

Salah satu aspek yang diperkenalkan oleh Perkins *et al.* (2013) adalah pentingnya konteks geografis dalam menentukan potensi pertumbuhan ekonomi daerah. Daerah dengan sumber daya alam yang melimpah, misalnya, akan memiliki keuntungan dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu, lokasi geografis yang strategis

dapat mempermudah akses ke pasar domestik dan internasional, serta mendukung kegiatan ekonomi seperti perdagangan dan distribusi barang.

- Sumber Daya Alam: Ketersediaan sumber daya alam, seperti hasil tambang, pertanian, atau energi, menjadi katalis utama dalam pertumbuhan ekonomi. Daerah yang kaya akan sumber daya alam akan lebih mudah untuk membangun industri berbasis sumber daya alam yang dapat menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi asing.
- Geografi dan Infrastruktur: Aksesibilitas yang baik melalui jalur transportasi yang efektif dapat menurunkan biaya logistik dan meningkatkan integrasi ekonomi daerah dengan ekonomi lainnya.

2. Interaksi antara Ekonomi Daerah dan Ekonomi Global

Perkins *et al.* (2013) juga menggarisbawahi pentingnya interaksi antara ekonomi daerah dengan ekonomi global. Daerah yang mampu beradaptasi dengan perubahan global, seperti perkembangan teknologi atau perubahan pola konsumsi, akan lebih mampu mengembangkan industri baru dan meningkatkan daya saing.

- Globalisasi dan Akses ke Pasar Eksternal: Daerah yang memiliki konektivitas baik dengan pasar internasional akan lebih mudah dalam mengeksport produk dan menerima investasi asing. Globalisasi dapat membawa peluang besar, tetapi juga tantangan bagi daerah yang tidak siap dalam hal infrastruktur, tenaga kerja, dan teknologi.
- Teknologi dan Inovasi: Pertumbuhan ekonomi daerah juga sangat dipengaruhi oleh adopsi dan adaptasi teknologi. Daerah yang mampu mengintegrasikan teknologi baru dalam proses produksi atau distribusi, seperti melalui digitalisasi, akan mengalami lonjakan produktivitas yang

signifikan. Selain itu, inovasi lokal dalam sektor-sektor tertentu dapat memberikan keunggulan kompetitif yang kuat.

3. Pentingnya Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Lokal

Teori ini menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pendidikan dan pelatihan yang memadai akan meningkatkan keterampilan tenaga kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan menciptakan lebih banyak peluang kerja berkualitas.

- Pendidikan dan Keterampilan: Daerah yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan memiliki tenaga kerja yang lebih terampil dan lebih inovatif. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan teknis, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan pasar tenaga kerja global menjadi sangat penting.
- Mobilitas Tenaga Kerja: Meningkatkan mobilitas tenaga kerja antar daerah atau sektor juga sangat penting. Dalam banyak kasus, daerah-daerah dengan tingkat pengangguran yang lebih tinggi dapat menanggulangi masalah tersebut dengan menciptakan peluang kerja yang lebih beragam atau meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal.

4. Kebijakan Pemerintah dan Peran Institusi Lokal

Teori Perkins *et al.* (2013) juga menekankan peran kebijakan pemerintah daerah yang proaktif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, mengurangi hambatan perdagangan, dan meningkatkan infrastruktur lokal.

- Kebijakan Fiskal dan Investasi: Pengelolaan anggaran yang baik untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sektor ekonomi lainnya sangat penting. Selain itu, kebijakan yang mendorong investasi

domestik dan asing, serta menciptakan iklim bisnis yang stabil, akan meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi daerah.

- Pembangunan Infrastruktur: Infrastruktur fisik dan non-fisik seperti jaringan jalan, listrik, teknologi informasi, dan pendidikan yang memadai adalah kunci untuk menghubungkan daerah dengan pasar yang lebih luas. Infrastruktur yang memadai dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi sektor-sektor utama dalam ekonomi daerah.

5. Pergeseran Struktural dalam Ekonomi Daerah

Perubahan dalam struktur ekonomi daerah juga menjadi fokus dalam teori ini. Perkins *et al.* (2013) berpendapat bahwa daerah yang dapat berhasil melakukan transformasi struktural dari sektor-sektor tradisional ke sektor-sektor yang lebih produktif (misalnya dari pertanian ke manufaktur dan jasa) akan mengalami pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.

- Industrialization: Proses industrialisasi yang baik dapat mendorong perkembangan ekonomi daerah dengan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas. Daerah yang berfokus pada sektor manufaktur atau jasa yang berbasis teknologi biasanya lebih dapat bertahan dalam persaingan global.
- Diversifikasi Ekonomi: Mengurangi ketergantungan pada satu sektor ekonomi tertentu, misalnya hanya pada pertanian atau tambang, akan menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih besar. Dengan mendiversifikasi sektor ekonomi, daerah dapat meminimalisir risiko yang muncul akibat fluktuasi harga komoditas atau bencana alam.

6. Teori Endogen dalam Konteks Ekonomi Daerah

Sebagian besar teori pertumbuhan ekonomi daerah menurut Perkins *et al.* (2013) bersifat endogen, yang berarti bahwa pertumbuhan ekonomi lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dalam daerah tersebut. Ini termasuk kualitas institusi, kebijakan yang diterapkan, serta kemampuan daerah untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pasar.

- Inovasi Lokal dan Kapasitas Institusional: Daerah yang memiliki kapasitas untuk mendorong inovasi melalui pendidikan, penelitian, dan pengembangan teknologi akan lebih siap untuk berkompetisi di pasar global. Pembentukan institusi yang kuat, baik dalam pemerintahan maupun sektor swasta, juga menjadi penentu kesuksesan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Sumber daya alam yang dikelola dengan bijaksana akan memberikan dampak positif yang berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Ini termasuk pengelolaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya alam serta pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan.

7. Peran Sektor Sosial dan Budaya

Sektor sosial dan budaya juga memainkan peran penting dalam teori ini. Faktor-faktor sosial seperti kestabilan sosial, tingkat kepercayaan, dan norma-norma kerja juga memengaruhi efektivitas kebijakan ekonomi dan produktivitas ekonomi daerah.

- Norma Sosial dan Nilai Kerja: Daerah dengan nilai-nilai sosial yang mendukung kerja keras, kejujuran, dan inovasi cenderung lebih mudah dalam menciptakan peluang ekonomi yang lebih banyak. Sebaliknya,

jika norma sosial tidak mendukung pembangunan ekonomi, maka proses pertumbuhan akan lebih terhambat.

- Partisipasi Masyarakat: Partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi dan sosial juga memperkuat pertumbuhan ekonomi. Daerah yang memberdayakan warganya dengan keterampilan, peluang kerja, dan akses ke sumber daya akan menciptakan basis ekonomi yang lebih kuat.

2.1.2 Konsep Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek fundamental dalam pengembangan ekonomi suatu negara. Infrastruktur, dalam hal ini, mencakup berbagai fasilitas dasar yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial, seperti jalan raya, sistem transportasi, pasokan air bersih, energi, telekomunikasi, dan infrastruktur perumahan. Infrastruktur berfungsi sebagai pondasi bagi kelancaran aktivitas perekonomian, memberikan aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat, dan mendorong peningkatan kualitas hidup (Perkins *et al.*, 2013).

Menurut Perkins *et al.* (2013), pembangunan infrastruktur tidak hanya mencakup pembangunan fisik, tetapi juga mencakup perencanaan, implementasi kebijakan yang efisien, dan pemeliharaan fasilitas yang telah dibangun. Pembangunan infrastruktur yang efektif dapat menciptakan dampak yang luas terhadap pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat makro maupun mikro. Selain itu, pembangunan infrastruktur harus berfokus pada pemerataan akses untuk mengatasi ketimpangan.

Di Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki tanggung jawab dalam pembangunan dan pemeliharaan

infrastruktur yang mencakup berbagai sektor. Infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR ini berperan penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah serta mendorong pemerataan pembangunan antar daerah. Seiring dengan meningkatnya kualitas infrastruktur, diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat terstimulus, karena infrastruktur yang lebih baik akan memperlancar alur distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan efisiensi dalam aktivitas produksi dan konsumsi (Perkins *et al.*, 2013).

Pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR secara umum meliputi beberapa bidang, yaitu: Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Perumahan. Berikut adalah penjelasan tentang peran Kementerian PUPR dalam pembangunan infrastruktur pada masing-masing bidang tersebut:

1. Bidang Bina Marga

Bina Marga berfokus pada pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta jembatan untuk mendukung kelancaran transportasi di seluruh Indonesia. Keberadaan infrastruktur jalan yang memadai memiliki peranan krusial dalam memperlancar distribusi barang dan mobilitas individu, sekaligus berkontribusi pada penguatan ekonomi dan pengurangan disparitas antar wilayah. Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020, tanggung jawab atas pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur dalam bidang Bina Marga terletak pada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR.

Program utama di bidang Bina Marga meliputi:

- a. Pembangunan Jalan Tol: Memperluas jaringan jalan tol di Indonesia merupakan salah satu fokus utama Kementerian PUPR. Jalan tol memiliki peran penting dalam mempercepat distribusi barang dan

individu, mengurangi kemacetan, serta meningkatkan daya saing ekonomi. Proyek Jalan Tol Trans Sumatera merupakan sebuah inisiatif signifikan yang menghubungkan kawasan dari Lampung hingga Aceh. Di samping itu, Jalan Tol Trans-Jawa dan Jalan Tol Trans-Kalimantan merupakan inisiatif monumental yang memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan konektivitas di tingkat nasional.

- b. Pembangunan Jalan Nasional: Kementerian PUPR memiliki tanggung jawab dalam pembangunan serta pemeliharaan jalan nasional yang menghubungkan beragam wilayah di Indonesia. Inisiatif ini melibatkan renovasi dan pemeliharaan infrastruktur jalan utama yang menghubungkan pusat-pusat urban dengan wilayah yang lebih terpencil. Contohnya, pembangunan Jalan Nasional Pesisir Barat Sumatra yang memiliki signifikansi besar bagi perekonomian dan distribusi barang di wilayah tersebut.
- c. Pembangunan Jembatan: Salah satu tanggung jawab fundamental Bidang Bina Marga adalah konstruksi jembatan yang bertujuan untuk mengintegrasikan daerah-daerah yang terpisah oleh sungai, teluk, atau kondisi geografis yang menantang. Contohnya, Jembatan Bareleng yang menghubungkan pulau-pulau di Provinsi Kepulauan Riau. Di samping itu, jembatan yang lebih kecil juga dirancang untuk menjamin aksesibilitas di wilayah-wilayah yang terpencil.
- d. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur: Perawatan berkala terhadap infrastruktur jalan dan jembatan memiliki signifikansi yang tinggi dalam memastikan keselamatan dan kenyamanan bagi para pengguna jalan. Kementerian PUPR juga melaksanakan program untuk

meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada dengan memperbaiki kondisi jalan yang mengalami kerusakan atau keausan.

2. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air (SDA) memiliki tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan serta pengelolaan air yang berkelanjutan. Infrastruktur yang dikembangkan dalam sektor ini memenuhi beragam kebutuhan masyarakat, mulai dari penyediaan air bersih, sistem irigasi pertanian, hingga pengembangan pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Di samping itu, sektor ini memiliki peran yang signifikan dalam mitigasi bencana alam, termasuk banjir dan kekeringan. Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020, tanggung jawab untuk pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur di bidang Sumber Daya Air terletak pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR.

Program utama di bidang Sumber Daya Air meliputi:

- a. Pembangunan dan Pemeliharaan Bendungan: Bendungan berfungsi sebagai infrastruktur esensial dalam pengelolaan sumber daya air untuk beragam tujuan, yang mencakup penyimpanan cadangan air untuk irigasi, penyediaan air bersih, serta sebagai sumber pembangkit tenaga listrik. Contoh proyek besar mencakup Bendungan Karangates di Jawa Timur dan Bendungan Jatigede di Jawa Barat, yang keduanya dirancang untuk mengatasi tantangan kekeringan serta memperkuat ketahanan pangan.
- b. Sistem Irigasi: Infrastruktur irigasi yang efektif memegang peranan krusial dalam sektor pertanian, khususnya di wilayah yang mengandalkan pertanian sebagai sumber utama penghidupan. Program

perbaikan jaringan irigasi yang dilaksanakan di berbagai daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan distribusi air secara merata serta mengurangi kerugian yang disebabkan oleh kekurangan atau kelebihan air.

- c. Pengendalian Banjir: Pengelolaan SDA memiliki tanggung jawab krusial dalam upaya pencegahan dan pengendalian bencana banjir yang kerap melanda kota-kota besar di Indonesia, contohnya Jakarta. Infrastruktur pengendalian banjir mencakup normalisasi sungai, pembangunan tanggul, serta saluran drainase yang dirancang untuk mengalirkan air secara efisien pada saat curah hujan yang tinggi.
- d. Pengelolaan Sumber Daya Air: Kementerian PUPR juga melaksanakan pengelolaan sumber daya air demi memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Salah satu inisiatif terkemuka adalah pengembangan Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA) beserta sistem distribusinya, yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan air berkualitas tinggi.

3. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat serta mendukung pembangunan sosial ekonomi melalui penyediaan berbagai infrastruktur publik dan fasilitas lingkungan. Infrastruktur yang dikembangkan dalam sektor ini secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik di lingkungan perkotaan maupun pedesaan. Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020, tanggung jawab atas pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur dalam bidang Cipta Karya terletak pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.

Program utama di bidang Cipta Karya meliputi:

- a. **Penyediaan Air Minum dan Sanitasi:** Program inti dalam Cipta Karya mencakup pembangunan serta pemeliharaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi. Kementerian PUPR melaksanakan pembangunan instalasi pengolahan air demi menjamin kualitas air bersih yang memenuhi standar konsumsi yang layak. Di samping itu, pengembangan sistem sanitasi yang memadai, seperti jaringan pembuangan air limbah, merupakan salah satu langkah penting dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat.
- b. **Infrastruktur Lingkungan dan Ruang Terbuka Publik:** Program ini meliputi pengembangan taman kota, ruang publik, serta fasilitas umum lainnya, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan sehat. Kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya telah berinisiatif mengembangkan sejumlah ruang terbuka hijau sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas udara dan menyediakan area rekreasi bagi masyarakat.
- c. **Pengelolaan Sampah:** Seiring dengan pertumbuhan jumlah sampah yang kian pesat, pengembangan program pengelolaan sampah yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan menjadi suatu keharusan yang mendesak. Salah satu inisiatif yang diambil oleh Kementerian PUPR adalah pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) serta penerapan sistem pengelolaan sampah yang menekankan pada prinsip pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang.
- d. **Infrastruktur Perkotaan:** Pembangunan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi mencakup sistem drainase, pembangunan jalan dan trotoar,

serta fasilitas umum yang mendukung kenyamanan dan mobilitas masyarakat di kota-kota besar.

4. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan hunian yang memenuhi standar kelayakan bagi seluruh segmen masyarakat, dengan perhatian khusus kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah, melalui Kementerian PUPR, melaksanakan berbagai inisiatif signifikan untuk mengatasi masalah backlog perumahan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020, tanggung jawab atas pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur di sektor Perumahan terletak pada Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR.

Program utama di bidang Perumahan meliputi:

- a. Program Sejuta Rumah (PSR): Sejak tahun 2015, pemerintah Indonesia telah menginisiasi Program Sejuta Rumah yang bertujuan untuk membangun satu juta unit hunian setiap tahun, dengan fokus utama pada masyarakat berpenghasilan rendah. Proyek ini berkontribusi pada pengurangan tumpukan masalah perumahan yang kian bertambah, sekaligus menyediakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang wajar.
- b. Pembangunan Rumah Susun dan Rumah Sederhana: Di tengah kepadatan perkotaan, Kementerian PUPR menginisiasi pembangunan rumah susun sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan hunian vertikal masyarakat. Di samping itu, untuk wilayah pedesaan dan suburban,

pemerintah juga mengembangkan hunian sederhana yang lebih dapat diakses oleh masyarakat dengan pendapatan rendah.

- c. **Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perumahan:** Penyediaan infrastruktur seperti jalan, saluran air, dan fasilitas umum lainnya di kawasan perumahan adalah elemen penting dalam program perumahan yang terintegrasi. Program ini bertujuan untuk menciptakan sebuah lingkungan hunian yang tidak hanya nyaman, tetapi juga aman dan sehat.

Selain itu, pembangunan infrastruktur harus melalui tahap perencanaan yang baik dan dilanjutkan dengan kebijakan pengelolaan pemanfaatan aset yang tepat, sehingga aktifitas ekonomi yang akan dijalankan oleh masyarakat sebagai pengguna dapat meningkat sesuai yang diharapkan. Contohnya pada infrastruktur jalan, penelitian oleh Damayanti *et al.* (2023) menunjukkan bahwa optimalisasi aset jalan nasional memerlukan pengelolaan yang efisien dengan penegakan regulasi, pelaksanaan sosialisasi terkait pemanfaatan aset, serta koordinasi antar pihak yang bertanggung jawab. Penelitian lebih lanjut oleh Gaol *et al.* (2023) menyoroti bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan, khususnya melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti koordinasi publik, kelayakan proyek, kebijakan, dan kerangka hukum. Di sisi lain, keputusan pemeliharaan jalan nasional juga bergantung pada kondisi jalan, alokasi dana, dan pengaduan masyarakat, sebagaimana diidentifikasi dalam penelitian Sari *et al.* (2023).

2.1.3 Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pembangunan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan efisiensi dalam produksi dan distribusi barang serta meningkatkan kapasitas sektor-sektor ekonomi untuk berkembang. Pembangunan infrastruktur juga dapat menciptakan efek multiplikasi, di mana pembangunan satu sektor infrastruktur akan berdampak positif terhadap sektor lainnya (Perkins *et al.*, 2013). Pembangunan infrastruktur yang berpotensi meningkatkan ekonomi ini diharapkan dapat menciptakan *Multiplier Effect* dan *Spillover Effect* yang positif.

Multiplier Effect merupakan suatu konsep yang merinci bagaimana perubahan dalam pengeluaran dapat menciptakan dampak yang lebih signifikan terhadap perekonomian secara keseluruhan. Ketika terjadi peningkatan pengeluaran dalam suatu sektor ekonomi, aliran uang yang dibelanjakan akan beredar dalam perekonomian dan memicu lebih banyak aktivitas ekonomi melalui rangkaian transaksi yang kompleks. Contohnya, apabila pemerintah mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk pengembangan infrastruktur, seperti jalan atau jembatan, perusahaan konstruksi akan menerima kompensasi, yang selanjutnya akan dimanfaatkan oleh pekerja untuk memperoleh barang dan jasa lainnya. Penjual barang dan jasa ini akan mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk memperoleh barang atau jasa lain, yang berimplikasi pada peningkatan produksi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan pendapatan dalam perekonomian secara keseluruhan.

Di sisi lain, *Spillover Effect* adalah fenomena di mana suatu aktivitas atau kebijakan dalam satu sektor atau wilayah memberikan dampak pada sektor atau

wilayah yang lain. *Spillover* sering kali muncul akibat keterkaitan dan interaksi antara ekonomi dan berbagai sektor dalam perekonomian. Walaupun dampak awal muncul di satu lokasi, efek tersebut dapat menyebar ke berbagai sektor atau tempat, baik melalui interaksi langsung maupun tidak langsung. Sebagai ilustrasi, pengembangan infrastruktur di suatu kawasan dapat memperluas akses ke pasar atau sumber daya bagi daerah sekitarnya, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian PUPR terfokus pada empat bidang utama, yaitu Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Perumahan, secara langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Setiap bidang infrastruktur ini memiliki pengaruh dalam meningkatkan efisiensi ekonomi, menciptakan peluang kerja, serta memperkuat daya saing Indonesia di panggung global.

Berikut adalah penjelasan tentang pengaruh pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada masing-masing bidang infrastruktur tersebut:

1. Bidang Bina Marga: Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan untuk Mempercepat Mobilitas Ekonomi

Infrastruktur transportasi, khususnya jalan dan jembatan, merupakan salah satu elemen fundamental yang berkontribusi pada pengembangan ekonomi. Bidang Bina Marga memiliki peranan penting dalam penyediaan infrastruktur yang mendukung konektivitas antar wilayah, meningkatkan efisiensi dalam distribusi barang, serta mempercepat mobilitas individu. Berikut adalah peran infrastruktur bidang Bina Marga dalam perekonomian:

- a. Meningkatkan Aksesibilitas dan Konektivitas

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan pusat-pusat urban dengan wilayah yang lebih terisolasi memiliki signifikansi yang mendalam dalam memperluas akses pasar serta menurunkan biaya transportasi. Jalan tol yang menghubungkan berbagai wilayah, seperti Jalan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatra, memfasilitasi pergerakan barang dan individu dengan lebih efisien, yang pada gilirannya mendorong peningkatan perdagangan antar daerah serta efisiensi dalam ekonomi. Schwab (2019) menyatakan bahwa infrastruktur transportasi yang efisien dapat menurunkan biaya logistik, yang secara langsung berpengaruh pada daya saing suatu negara.

b. Mengurangi Biaya Logistik

Pembangunan infrastruktur yang efisien berkontribusi pada pengurangan biaya logistik serta meningkatkan kelancaran distribusi barang di antara berbagai daerah. Bahl (2010) menegaskan bahwa efisiensi logistik merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing suatu negara dalam perdagangan internasional. Kualitas infrastruktur transportasi, termasuk jalan tol, bandara, dan pelabuhan, memiliki peranan yang sangat penting dalam menurunkan biaya transaksi serta meningkatkan efisiensi ekonomi.

c. Mendorong Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan

Melalui pengembangan infrastruktur yang memadai, sektor-sektor ekonomi seperti industri dan perdagangan berpotensi untuk mengalami pertumbuhan yang signifikan. Menurut Stern (2015), negara-negara yang berhasil mengembangkan jaringan transportasi mereka dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi dalam produksi dan distribusi

barang, yang pada gilirannya berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.

2. Bidang Sumber Daya Air: Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Ketahanan Nasional

Sumber daya air memiliki peranan yang krusial dalam mendukung berbagai sektor ekonomi, khususnya dalam bidang pertanian, industri, dan pembangkit energi. Bidang Sumber Daya Air menekankan pentingnya penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang berkaitan dengan air, yang berperan signifikan dalam mendukung keberlanjutan ekonomi serta memperkuat ketahanan pangan dan energi. Berikut adalah peran infrastruktur bidang Sumber Daya Air dalam perekonomian:

a. Mendukung Sektor Pertanian

Pengelolaan irigasi yang efisien merupakan aspek krusial dalam meningkatkan hasil produksi pangan. Infrastruktur irigasi yang dirancang dengan cermat, seperti bendungan dan saluran irigasi, memiliki potensi untuk memastikan ketersediaan air yang memadai bagi sektor pertanian sepanjang tahun. Menurut World Bank (2010), investasi dalam infrastruktur irigasi secara langsung berkontribusi pada peningkatan produktivitas pertanian, yang merupakan sektor utama di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Bendungan yang dirancang oleh Kementerian PUPR, seperti Bendungan Karangates dan Bendungan Jatigede, memiliki peran penting dalam meningkatkan pasokan air untuk sektor pertanian. Hal ini, pada gilirannya, berkontribusi pada pengurangan ketergantungan terhadap musim hujan serta peningkatan hasil pertanian.

b. Pembangkit Energi Terbarukan

Bendungan dan waduk yang dirancang oleh Kementerian PUPR juga berperan sebagai sumber energi melalui pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Hal ini tidak hanya menawarkan pasokan energi yang konsisten, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan ketergantungan Indonesia terhadap sumber energi fosil. Energi yang lebih terjangkau dan berkelanjutan memiliki potensi untuk mendukung beragam sektor industri serta memperkuat daya saing ekonomi nasional. UNDP (2013) menegaskan bahwa pengembangan infrastruktur energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga air, dapat meningkatkan perekonomian dengan menyediakan pasokan energi yang hemat biaya dan berkelanjutan untuk sektor industri.

c. Mencegah Kerugian Ekonomi Akibat Bencana

Pengelolaan air yang efektif berkontribusi pada pengurangan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh bencana alam, seperti banjir dan kekeringan. Infrastruktur seperti bendungan, tanggul, dan saluran drainase berperan penting dalam memitigasi dampak negatif dari bencana banjir, yang kerap mengganggu aktivitas ekonomi dan merusak sektor pertanian. Mirdal & Nasr (2012) mengemukakan bahwa pengelolaan sumber daya air yang efektif, termasuk upaya mitigasi bencana banjir, memiliki potensi untuk melindungi aset ekonomi, infrastruktur, serta aktivitas ekonomi masyarakat.

3. Bidang Cipta Karya: Pembangunan Fasilitas Umum dan Infrastruktur Lingkungan untuk Meningkatkan Kualitas Hidup dan Produktivitas Masyarakat

Bidang Cipta Karya memiliki peran krusial dalam pengembangan infrastruktur yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, melalui penyediaan fasilitas umum yang esensial seperti air minum, sanitasi, dan ruang terbuka hijau. Infrastruktur ini berperan penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi melalui penciptaan lingkungan yang sehat dan produktif. Berikut adalah peran infrastruktur bidang Cipta Karya dalam perekonomian:

a. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Infrastruktur yang berkualitas, termasuk penyediaan air bersih, sistem sanitasi yang efisien, serta lingkungan yang terjaga kebersihannya dan ditanami pepohonan, berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat. Devarajan *et al.* (2013) menyatakan bahwa kesehatan yang optimal merupakan elemen fundamental dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang mendukung kualitas hidup, seperti ruang terbuka hijau, berkontribusi pada penciptaan lingkungan yang nyaman, yang pada gilirannya meningkatkan daya tarik investasi di suatu wilayah.

b. Mendukung Pertumbuhan Perkotaan yang Terencana

Pembangunan infrastruktur perkotaan, termasuk jalan, transportasi umum, dan ruang terbuka publik, berkontribusi pada perkembangan kota yang lebih terencana dan efisien. Kota-kota dengan infrastruktur yang memadai cenderung lebih mudah bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, karena mampu mendukung beragam aktivitas ekonomi seperti perdagangan, industri, dan jasa. World Bank (2016)

menegaskan bahwa kota dengan sistem transportasi yang efisien, pengelolaan sampah yang efektif, dan perumahan yang memadai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

c. Menarik Investasi dan Mendorong Kegiatan Ekonomi

Infrastruktur lingkungan yang memadai juga menghasilkan iklim investasi yang menarik. Area yang memiliki manajemen limbah yang efektif, sistem drainase yang optimal, serta ruang terbuka hijau yang terpelihara dengan baik dapat menarik minat investor dan meningkatkan daya tarik sektor pariwisata, serta menciptakan peluang kerja yang baru. Porter (1990) berpendapat bahwa kualitas infrastruktur di kota memiliki dampak signifikan terhadap daya tarik ekonomi dan dapat merangsang peningkatan kegiatan ekonomi yang lebih substansial.

4. Bidang Perumahan: Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendorong Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Sektor Perumahan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan sosial, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan konsumsi. Berikut adalah peran infrastruktur bidang Perumahan dalam perekonomian:

a. Mendorong Pertumbuhan Sektor Konstruksi dan Industri Pendukung

Pembangunan perumahan adalah salah satu sektor yang memiliki kapasitas signifikan dalam menyerap tenaga kerja. Proyek pembangunan rumah, baik dalam bentuk rumah susun maupun rumah

sederhana, berperan penting dalam mendorong dinamika sektor konstruksi serta industri pendukung seperti semen, baja, dan berbagai bahan bangunan lainnya. Hal ini menghasilkan banyak peluang kerja dan memperkuat kemampuan ekonomi masyarakat. Diao *et al.* (2010) menyoroti bahwa sektor konstruksi yang berkembang pesat memberikan kontribusi yang substansial terhadap perekonomian melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan konsumsi domestik.

b. Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Dengan memiliki hunian yang memadai, individu dalam masyarakat dapat merasakan tingkat keamanan dan stabilitas sosial yang lebih tinggi. Hal ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendistribusikan pendapatan mereka ke dalam sektor konsumsi yang lain, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Haughwout *et al.* (2012) mengemukakan bahwa peningkatan daya beli masyarakat yang berasal dari kepemilikan rumah memiliki peranan signifikan dalam mempercepat konsumsi dan pertumbuhan ekonomi.

c. Menciptakan Sumber Pendapatan dan Peningkatan Kualitas Hidup

Membangun hunian yang terjangkau bagi individu dengan penghasilan rendah juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki kualitas hidup serta meningkatkan pendapatan mereka. Dengan hunian yang lebih baik dan aman, individu dapat menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk mengembangkan keterampilan, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas mereka dalam aktivitas ekonomi. Hsieh & Moretti (2019) mengemukakan bahwa stabilitas

perumahan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengalihkan sumber daya mereka ke sektor-sektor produktif yang lain.

Sejumlah penelitian empiris mengindikasikan bahwa pembangunan infrastruktur memberikan dampak yang substansial terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Canning (1998) dalam penelitiannya menguraikan bahwa infrastruktur yang efisien memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, memperluas pasar, serta mengurangi biaya transaksi. Infrastruktur yang efisien memainkan peran krusial dalam mendukung sektor-sektor ekonomi utama, termasuk perdagangan, industri, dan pertanian, yang secara simultan mempercepat pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.

Namun, pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tidak selalu dapat dirasakan secara langsung. Berbagai penelitian mengindikasikan bahwa elemen-elemen seperti mutu perencanaan, manajemen, dan partisipasi masyarakat turut berkontribusi terhadap sejauh mana pembangunan infrastruktur mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. World Bank (2016) menekankan signifikansi kebijakan yang mendukung distribusi pembangunan infrastruktur yang seimbang antara wilayah-wilayah yang lebih maju dan daerah-daerah yang terpencil, agar dampaknya dapat dirasakan secara adil dan merata. Lebih jauh lagi, penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Syarifuddin (2021) menyoroti pentingnya penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam membangun hubungan keagenan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, pendekatan ini dapat diterapkan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan menciptakan hubungan kerja yang lebih efektif di antara para pemangku kepentingan.

2.2 Tinjauan Empiris

Pembangunan infrastruktur sering dipandang sebagai elemen fundamental yang mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Infrastruktur yang memadai tidak hanya berfungsi untuk mendukung aktivitas ekonomi secara keseluruhan, tetapi juga berperan sebagai katalis utama dalam mempercepat kemajuan di wilayah-wilayah yang masih tertinggal. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur nasional, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Dalam konteks ini, studi-studi sebelumnya menyajikan analisis mengenai keterkaitan antara pembangunan infrastruktur dan pengaruhnya terhadap perekonomian daerah. Tinjauan ini akan menganalisis berbagai temuan empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini.

2.2.1 Pembangunan Infrastruktur sebagai Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan infrastruktur yang memadai di berbagai sektor, termasuk transportasi, energi, air bersih, dan perumahan, diyakini mampu meningkatkan efisiensi ekonomi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Aschauer (1989) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa investasi publik dalam infrastruktur memiliki peranan yang krusial terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Aschauer menyatakan bahwa peningkatan investasi infrastruktur menghasilkan efek yang menguntungkan terhadap output ekonomi, khususnya pada sektor-sektor yang sangat tergantung pada infrastruktur, seperti perdagangan dan industri manufaktur.

Namun, dalam penelitian Aschauer (1989) juga menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak selalu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Aschauer (1989) dalam penelitiannya menemukan bahwa peningkatan investasi infrastruktur di Amerika Serikat tidak selalu menghasilkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur yang lebih baik berpotensi menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi ekonomi, efek langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kualitas tenaga kerja dan kebijakan ekonomi lokal. Di beberapa daerah, meskipun terjadi pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak tercapai karena ketergantungan pada faktor-faktor eksternal dan ketidaksiapan daerah dalam memanfaatkan infrastruktur yang dibangun.

Selain itu, penelitian oleh Guiso *et al.* (2004) menunjukkan bahwa faktor institusional dan kebijakan ekonomi lokal lebih menentukan pertumbuhan ekonomi daerah daripada sekadar pembangunan infrastruktur. Mereka menyatakan bahwa meskipun infrastruktur dapat meningkatkan konektivitas dan akses pasar, faktor-faktor seperti kestabilan politik, kualitas hukum, dan transparansi kebijakan lebih penting dalam memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di banyak daerah, meskipun infrastruktur telah dibangun dengan baik, ketidakstabilan ekonomi atau kelemahan institusional bisa mengurangi dampaknya terhadap perekonomian.

2.2.2 Peran Infrastruktur dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah

Infrastruktur memainkan peran kunci dalam proses pembangunan ekonomi, khususnya dalam mengurangi ketimpangan ekonomi antar daerah. Teori yang

dikemukakan oleh Perkins, Radelet, Lindauer, & Block (2013) dalam *buku "Economic of Development"* menjelaskan bagaimana infrastruktur yang memadai dapat menciptakan hubungan yang saling mendukung antara sektor ekonomi yang berbeda dan berperan penting dalam meningkatkan produktivitas serta pemerataan pembangunan. Infrastruktur yang baik dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dengan cara menyediakan akses yang lebih merata terhadap peluang ekonomi dan layanan dasar.

Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya oleh Kementerian PUPR, memiliki tujuan untuk mencapai pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Ketimpangan pembangunan antara wilayah yang lebih berkembang dan yang kurang berkembang sering kali menjadi hambatan signifikan dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh. Purnomo (2017) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa pembangunan infrastruktur di kawasan-kawasan yang kurang berkembang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah. Pembangunan infrastruktur yang merata akan memperkuat daya tarik investasi, memperluas aksesibilitas ke pasar, serta memfasilitasi distribusi barang dan jasa, yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan produktivitas ekonomi daerah.

2.2.3 Dampak Infrastruktur terhadap Sektor Ekonomi Lokal

Infrastruktur yang baik tidak hanya berkontribusi pada peningkatan efisiensi ekonomi makro, tetapi juga memiliki pengaruh langsung terhadap sektor-sektor ekonomi lokal. Wibowo (2020) dalam penelitiannya tentang pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah mengungkapkan bahwa pengembangan infrastruktur, khususnya di sektor transportasi dan komunikasi, secara substansial

meningkatkan daya saing ekonomi wilayah tersebut. Wibowo menegaskan bahwa peningkatan aksesibilitas yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol dan fasilitas transportasi massal, berkontribusi pada kemajuan sektor perdagangan, manufaktur, dan pariwisata, yang merupakan pilar-pilar ekonomi utama di berbagai daerah.

Namun di sisi lain, penelitian oleh Munnell (1992) menunjukkan bahwa meskipun pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan kualitas hidup dan menarik investasi, dampak langsung terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah tidak selalu sejalan dengan harapan. Munnell menunjukkan bahwa infrastruktur memang memengaruhi beberapa sektor ekonomi, tetapi dalam beberapa kasus, daerah-daerah yang lebih maju secara ekonomi sudah memiliki infrastruktur yang memadai dan dengan demikian, penambahan infrastruktur tidak memberikan peningkatan yang signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

2.2.4 Dampak Infrastruktur terhadap Penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Pengangguran

Salah satu konsekuensi yang sering kali dihubungkan dengan pembangunan infrastruktur adalah munculnya peluang kerja baru. Pembangunan infrastruktur yang signifikan, seperti proyek jalan, jembatan, dan bendungan, memerlukan tenaga kerja yang substansial, baik pada fase konstruksi maupun dalam operasional jangka panjang. Santoso (2016) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah berpotensi untuk menurunkan tingkat pengangguran, khususnya di wilayah-wilayah yang tengah menghadapi tantangan ekonomi.

Penelitian oleh Ferreira *et al.* (2018) yang dilakukan di beberapa negara berkembang menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur fisik (seperti jalan raya

dan energi) sering dianggap sebagai penopang penting bagi pertumbuhan ekonomi, dalam beberapa kasus pengaruhnya terbukti terbatas. Di beberapa wilayah, pembangunan infrastruktur tidak memberikan hasil yang diinginkan dalam hal pertumbuhan ekonomi jika tidak disertai dengan peningkatan kapasitas sektor produktif daerah tersebut. Misalnya, dalam daerah-daerah dengan sektor ekonomi yang lemah atau rendahnya keterampilan tenaga kerja, pembangunan infrastruktur tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Selain itu, ketergantungan pada sumber daya alam atau sektor tertentu juga bisa menghambat diversifikasi ekonomi yang diperlukan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.